

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Tionghoa sebagai bagian dari kenyataan kebhinekaan masyarakat Indonesia ini, mengharuskan suatu pengetahuan dan pengertian yang lebih mendalam mengenai sejarah dan peranan golongan minoritas dalam masyarakat luas (Marissa : 2014). Kemudian muncul kesimpulan bahwa walaupun jumlah orang Tionghoa di Indonesia relatif sedikit, mereka merupakan kelompok minoritas yang berarti. Dengan kata lain, meskipun dari segi ekonomi etnis Tionghoa lebih menonjol dari Pribumi, kemungkinan terjadinya benturan-benturan yang diperbesar dengan adanya segi-segi sosial, budaya, dan politik, dan dasar-dasarnya terbentuk sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan kebijakan yang sangat sistematis memisahkan berbagai golongan penduduk dengan golongan lainnya, termasuk golongan etnis Tionghoa (Mely, 1979).

Catatan terbaru mengenai kedatangan Tionghoa ke Indonesia adalah pada abad ke-5 yang ditandai dengan kedatangan Fa Hien atau Faxien, seorang pendeta Budha pada awal abad tersebut. Faxian adalah orang pertama yang memperkenalkan nama serta posisi geografis pulau Jawa kepada dunia yang lebih luas, dalam hal ini para pedagang Cina di pelabuhan-pelabuhan dan bandar pedagang di wilayah Cina Tenggara yang sudah berkembang pada periode tersebut. Faxian dikatakan sebagai orang yang membuka pintu lalu lintas Tionghoa ke Nusantara, dari semenjak itulah arus masuk Tionghoa ke Nusantara melalui jalur Laut. Pada awalnya imigran dari Cina tersebut tidak berencana selamanya di wilayah baru. Mereka hanya menetap sementara dan akan kembali

ke tanah kelahirannya, demikian terus terjadi berulang-ulang, mereka dikenal dengan sebutan Huaqiao yang artinya orang Tionghoa yang merantau dan akan kembali lagi (Erniwati,2007).

Jika dilihat dari catatan sejarah, perkiraan kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia yaitu pada abad 16-19 Masehi. Kedatangannya berawal dari leluhur etnis Tionghoa yang datang secara bergelombang ke Indonesia ribuan tahun yang lalu. Pada awalnya etnis Tionghoa tinggal di daerah pelabuhan pantai barat Sumatera tahun 1630 Masehi (Erniwati,2007). Akibat dari kedatangan mereka secara bergelombang menimbulkan beberapa masalah seperti masalah identitas yang berlangsung hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari golongan Tionghoa telah membaaur dengan masyarakat Indonesia, akan tetapi hal itu terbatas pada tingkat penyesuaian masih belum ada terjadi asimilasi (Koentjaraningrat,1985 : 256)

Etnis Tionghoa ini mulai menyebar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Sumatera Barat. Daerah-daerah yang pernah ditempati oleh etnis Tionghoa di Sumatera Barat antara lain, pelabuhan Padang, Tiku dan Painan. Untuk pemukiman etnis Tionghoa memilih di daerah perkotaan yaitu di daerah Padang dan Pariaman (Rhahima,2014). Di kota Padang memiliki daerah khusus untuk pemukiman etnis Tionghoa yaitu daerah Pondok dan merupakan pemukiman etnis Tionghoa terbesar di Sumatera Barat. Semakin lama etnis Tionghoa yang ada di Sumatera Barat mulai menyebar hingga ke pedalaman salah satunya adalah Bukittinggi (Erniwati,2007). Etnis Tionghoa yang ada di Bukittinggi relatif kecil apabila dibandingkan dengan masyarakat Minangkabau

yang mayoritas. Kehidupan etnis Tionghoa di Bukittinggi jauh dari konflik yang biasa terjadi pada masyarakat yang heterogen. Kehidupan yang relatif tidak ada konflik, saling bertoleransi dan hidup berdampingan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan etnis Tionghoa dan masyarakat lokal Bukittinggi kelihatannya hidup rukun dan damai.

Sejarah Indonesia menceritakan posisi etnis Tionghoa mengalami dinamika yang berfluktuatif akibat pengaruh dari kondisi politik dalam dan luar negeri Indonesia. Pengalaman sejarah menjadikan komunitas etnis Tionghoa berada pada posisi yang tidak menentu. Mereka dihadapkan pada kondisi yang dapat mempengaruhi eksistensi dalam berbagai aspek kehidupan (Erniwati, 2011:68).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 Februari 2020 di kampung Cina di Bukittinggi, mereka tidak menutup diri dan ikut berpartisipasi ketika diadakan kegiatan oleh pemerintah kota Bukittinggi seperti gotong royong, kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan ibu-ibu PKK di kelurahan tersebut. Etnis Tionghoa menghormati dan menghargai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat lokal, mereka menghargai dengan cara ketika bulan puasa Ramadhan dengan tidak membuka kedai yang menjual makanan dan minuman, walaupun rata-rata dari mereka etnis Tionghoa tidak berpuasa, hal ini juga dikarenakan mereka memiliki kerabat yang beragama muslim, mereka akan datang ketika peringatan keagamaan umat Muslim pada hari lebaran.

Etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas yang marginal, marginal disini bisa dilihat dari berbagai aspek salah satunya dari aspek geografis yang

merujuk kepada kawasan tempat tinggal, dimana etnis Tionghoa terbiasa hidup berkelompok dengan sesama mereka, walaupun beberapa ada juga yang tinggal terpisah tidak di lingkungan kelompok etnis Tionghoa sehingga keberadaanya selalu diwarnai berbagai macam peristiwa misalnya interaksi yang terjalin dengan sesama mereka etnis Tionghoa ataupun adaptasi yang dilakukan etnis Tionghoa dengan masyarakat diluar etnis Tionghoa yang menarik untuk diamati.

Keberadaan etnis Tionghoa yang menyebar di Indonesia dan memiliki kehidupan yang tidak sama setiap daerahnya. Hal ini dapat terlihat pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat yang mana jauh dari hiruk-pikuk permasalahan dan pertikaian baik itu dari segi sosial, politik, budaya, dan ekonominya. Hal yang sama juga terjadi pada etnis Tionghoa yang berada di Bukittinggi.

Etnis Tionghoa di Bukittinggi hidup rukun, damai, berbaur dengan masyarakat lokal di Bukittinggi. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari dengan masyarakat lokal yaitu bahasa Indonesia dan Minangkabau, pakaian yang mereka gunakan tidak berbeda jauh dengan masyarakat lokal di Bukittinggi. Lokasi tempat tinggal etnis Tionghoa di wilayah Kampung Cina, tepatnya di Kelurahan Benteng Pasar Atas. Penempatan ini sesuai dengan peraturan *Wijkenstelsel*¹ yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1856 mengenai penetapan tempat tinggal untuk orang Tionghoa di Sumatera (https://id.wikipedia.org/wiki/kota_Bukittinggi, Tionghoa Bukittinggi, diakses pada 07 Agustus 2019).

¹ *Wijkenstelsel* adalah aturan yang menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinaan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wijkenstelsel> akses jam 16:08 (07-08-2019)

Sejauh ini perkembangan jumlah penduduk etnis Tionghoa di Sumatera Barat tidak terlepas dari peran kota menjadi pusat perdagangan, khususnya yang terjadi di Minangkabau. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pasar oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1890 (Adlan : 2016) di Bukittinggi yang merupakan daerah strategis, di tengah-tengah dataran tinggi Sumatera Barat, serta sebagai kota pariwisata.

Dewasa ini keunikan dari etnis Tionghoa di Bukittinggi terlihat dari keberadaan usaha bisnis mereka yang membur di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang juga memiliki kemampuan dibidang ekonomi. Keunikan hubungan antara etnis Tionghoa dan etnis Minangkabau yang sama-sama memiliki modal dan kemampuan berdagang adalah orang Tionghoa memposisikan dirinya hanya sebagai pelaku ekonomi, tanpa memasuki urusan sistem sosial, budaya dan politik masyarakat Sumatera Barat.

Perkembangan etnis Tionghoa di beberapa kota di Indonesia salah satunya etnis Tionghoa yang ada di kota Palembang. Keberadaan etnis Tionghoa di kota Palembang diterima dengan baik, etnis Tionghoa dapat beradaptasi dengan masyarakat lokal Palembang secara sosial ekonomi, kemasyarakatan dan budaya. Kemampuan adaptasi ini bisa dapat terlihat pada kemampuan bertahan hidup dengan modal pengembangan usaha dagang dan berkecimpung dalam bidang politis, meskipun etnis Tionghoa telah beradaptasi dengan baik terutama dengan Melayu-Palembang etnis Tionghoa tetap mempertahankan identitasnya (Nursafia :2019). Pembauran yang terjadi antara masyarakat Makassar dengan etnis Tionghoa sudah mulai terjalin, walaupun dalam interaksi sosial masih terasa kaku

dan terbatas. Semua ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial ekonomi antara etnis Tionghoa dan masyarakat Makasar.

Dari sisi demografis etnis Tionghoa yang ada di Bukittinggi, sekitar 15 tahun lalu memiliki jumlah populasi yang banyak, namun sekarang justru mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penurunan perkembangan ini terlihat pada tabel dibawah. Secara observasional, peneliti juga mendapatkan fakta jumlah keluarga etnis Tionghoa di Bukittinggi yang tidak signifikan.



Tabel 1
Jumlah Penduduk Tionghoa di Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Jumlah
1.	2005	167 orang
2.	2006	165 orang
3.	2007	163 orang
4.	2008	160 orang
5.	2009	158 orang
6.	2010	156 orang
7.	2011	153 orang
8.	2012	150 orang
9.	2013	148 orang
10.	2014	145 orang
11.	2015	143 orang
12.	2016	140 orang
13.	2017	137 orang
14.	2018	125 orang
15.	2019	112 orang
16.	2020	103 orang

Sumber : Sekretaris Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Bukittinggi Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk etnis Tionghoa. Penurunan jumlah ini terjadi tiap tahunnya. Selanjutnya data diatas didukung dengan tabel di bawah ini data dari BPS, yang dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2020 yang menunjukkan jumlah etnis Tionghoa yang berdomisili di Kelurahan Benteng Pasar Atas.



Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Tahun	WNI	Etnis Tionghoa
1998	88335	297
1999	88377	297
2000	92454	295
2001	93233	30
2002	94307	19
2003	98505	20
2004	100304	16
2005	101247	16
2006	102206	17
2007	104256	17
2008	106023	17
2009	107783	17
2010	111290	17
2011	113547	17

2012	114393	17
2013	118260	17
2014	120491	17
2015	122621	17
2016	124715	17
2017	126804	17
2018	128783	17
2019	130733	17

Sumber : BPS kota Bukittinggi 2019

Data mengenai jumlah etnis Tionghoa yang ada pada tabel di atas bersumber dari kantor BPS kota Bukittinggi dimana untuk mendapatkannya penuli mencari data penduduk Guguk Panjang dalam Angka, kemudian hasil yang didapatkan sama semenjak dari tahun 2006, hal ini diutarakan oleh pihak yang mengelola BPS bahwasanya mereka tidak mensurvei ke lapangan mengenai perubahan pada jumlah etnis Tionghoa yang ada di Bukittinggi, mereka hanya melakukan pengecekan minimal sekali dalam sepuluh tahun, sehingga mereka membuat data yang sama semenjak terakhir kali mereka melakukan survey kelapangan, tidak dipungkiri mereka mengetahui pastinya ada perubahan dalam jumlah data banyaknya etnis Tionghoa yang tinggal di Bukittinggi, ada kemungkinan naik turun jumlah per tahunnya, tetapi mereka tidak bisa memastikan jumlah pastinya.

Jika dilihat dari kehidupan etnis Tionghoa di Bukittinggi yang hidup rukun dan damai dengan masyarakat lokal, tanpa memiliki konflik namun banyak dari mereka yang keluar dari kota Bukittinggi. Bahkan tidak jarang dari mereka yang

memilih menetap di luar kota Bukittinggi dan tidak kembali lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa sebagian penduduk etnis Tionghoa memilih untuk keluar dari kota Bukittinggi dan memilih tidak kembali bermukim di kota ini, sehingga menjadikan jumlah populasinya mereka menurun terus dari tahun ke tahun?, namun hal tidak menjadikan etnis Tionghoa sama sekali tidak ada di Bukittinggi.

Seseorang atau kelompok memilih untuk keluar dari suatu daerah pastinya memiliki alasan tertentu. Todoró mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan fenomena perpindahan penduduk yang terus terjadi tiap tahunnya, yakni tidak terlepas dari karakteristik struktur ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik dan hukum suatu wilayah (Khotijah, 2008: xix).

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Todoró di atas, memungkinkan juga terjadi pada kasus etnis Tionghoa di Bukittinggi. Karakteristik struktur ekonomi, perekonomian etnis Tionghoa di Kota Bukittinggi faktanya tidak berkembang. Padahal potensi ekonomi mereka cukup berpeluang di kota Bukittinggi, apalagi selama ini etnis Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang berkarakter tangguh dalam bisnis dan bahkan menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Artinya, dalam hal ini etnis Tionghoa dipahami sebagai etnis yang mempunyai kemampuan tinggi dalam strategi peningkatan perekonomian dalam kehidupan terutama dalam berdagang. Dari segi faktor sosial dan budaya, peneliti mendapatkan fakta bahwa etnis Tionghoa di Bukittinggi ternyata tidak mampu berintegrasi dengan masyarakat lokal secara mendalam. Ada faktor lain yang berpengaruh yaitu prasangka sosial yang cenderung negatif di antara kedua belah

sisi yaitu masyarakat setempat dan etnis Tionghoa, sehingga keduanya tidak membangun perkembangan ekonomi yang signifikan.

Suparlan berpendapat bahwa perbedaan etnis dan keinginan untuk mendapatkan hak-hak, membutuhkan penyatuan persepsi dan semangat yang sama di antara etnis yang berbeda. Meski ada upaya untuk melenyapkan diskriminasi rasial, namun pengakuan terhadap perbedaan dalam kesederajatan baik secara sosial maupun individu harus dapat diciptakan di antara kedua belah pihak etnis yang berbeda (Suparlan:2005).

Berdasarkan fakta bahwa masih ada sejumlah etnis Tionghoa yang bermukim di Bukittinggi, maka dapat dikatakan bahwa mereka sekarang tergolong sebagai etnis minoritas. Terhadap etnis Tionghoa yang minoritas ini, apa pandangan dari masyarakat Minangkabau terhadap etnis Tionghoa tersebut cukup penting untuk diketahui dan diteliti, karena mereka tetap saling berinteraksi setiap hari. Persepsi yang dimaksud disini adalah pengetahuan mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Bukittinggi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tema Kecenderungan penurunan jumlah anggota Komunitas Tionghoa yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi etnis Tionghoa itu sendiri , dengan memilih kasus Etnis Tionghoa Di Bukittinggi.